

POTENSI DAN PENINGKATAN INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN DI PROVINSI BALI

Made Suyana Utama

Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana

Email : suyanautama@gmail.com

Abstract : Potential and Increasing Investment in Agriculture Sector in the Context of Increased Contribution to the Economy In the Province of Bali. World Food Security Summit held in November 2009 produced a commitment to increase investment in agriculture and eliminating hunger sooner than originally targeted, as well as to reduce poverty and food security for the community. Consistent with the policy of autonomy, in order to develop the agricultural sector investments, then each area is expected to attract as many investors are willing to invest for the development of their respective regions.

Keywords : potency, investment, agriculture, regional autonomy

Abstrak : Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali. KTT Ketahanan Pangan Dunia yang diselenggarakan pada Bulan November 2009 menghasilkan komitmen untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian dan mengeliminasi masalah kelaparan lebih cepat dari yang ditargetkan semula, serta untuk mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan untuk masyarakat. Selaras dengan kebijakan otonomi, dalam rangka pengembangan investasi sektor pertanian, maka setiap daerah diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan daerah masing-masing.

Kata kunci : potensi, investasi, pertanian, otonomi daerah

PENDAHULUAN

Sejak lama disadari bahwa investasi atau penanaman modal sangat penting dalam pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian, sehingga merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pembangunan dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Van der Eng (2008) mengatakan bahwa dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, yang mana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat, yang kemudian mempercepat pertumbuhan laju ekonomi nasional.

Peranan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah lama ditelusuri oleh Harrod dan Domar dengan membangun suatu model berdasarkan pengalaman negara maju. Mereka memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi melalui proses akselerasi dan proses multipler. Pertama, menciptakan pendapatan yang juga disebut “**dampak permintaan**”, dan kedua,

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan menciptakan stok kapital, yang juga disebut “**dampak penawaran**” dari investasi. Oleh karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, maka pendapatan riil dan output akan senantiasa meningkat (Sukirno, 2001).

Peningkatan investasi melalui peningkatan barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Sebab peningkatan stok barang modal secara nasional akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan juga dapat memperluas kesempatan kerja. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil, baik untuk mendirikan perusahaan baru maupun untuk memperluas usaha yang telah ada dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sejarah menunjukkan bahwa penemuan baru dalam bidang teknologi mendorong pengusaha untuk membeli barang modal baru termasuk juga pabrik-pabrik baru untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan efisiensi. Sehingga dapat

dikatakan bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatnya investasi. Penerapan teknologi baru akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan modal adalah meningkat. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan nasional secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Selanjutnya akan berakibat meningkatnya permintaan investasi untuk menyediakan barang-barang konsumsi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa meningkatnya investasi juga disebabkan karena meningkatnya pendapatan nasional (Sukirno, 2001).

Kekurangan modal pada negara-negara berkembang secara umum disebabkan karena pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan rendah disebabkan karena produktivitas penduduk yang juga rendah. Selain disebabkan oleh belum terolahnya sumberdaya alam, produktivitas yang rendah juga disebabkan oleh sumberdaya manusia yang masih terbelakang. Keterbelakangan tersebut dicirikan oleh kesehatan dan gizi yang kurang, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta investasi yang rendah. Tingkat investasi yang rendah disebabkan oleh tingkat tabungan yang kecil. Tingkat tabungan yang kecil disebabkan karena pendapatan yang kecil, demikian seterusnya hal tersebut akan berlanjut. Keadaan ini disebut sebagai sebuah lingkaran setan (*vicious circle*).

Berkaitan dengan hal di atas, upaya menggairahkan investasi pada suatu daerah bertujuan untuk mencegah turunnya pendapatan perkapita dengan adanya kenaikan penduduk. Dengan menurunnya pendapatan perkapita akan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebab akses masyarakat terhadap beberapa komponen kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Investasi yang rendah jika dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya perangkap keseimbangan rendah (*low equilibrium trap*).

Penggairahan iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1/Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 11/tahun 1970 dan No. 12/tahun 1970.

Perbaikan iklim penanaman modal terus dilakukan oleh pemerintah, terutama sejak awal Pelita IV, tepatnya tahun 1984. Melalui berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan penyederhanaan mekanisme perijinan, penyederhanaan impor barang modal, pelunakan syarat-syarat investasi, serta rangsangan investasi untuk sektor-sektor dan di daerah-daerah tertentu. Dewasa ini kesempatan berinvestasi di Indonesia semakin terbuka. Hal ini dilakukan disamping dalam rangka menarik investasi langsung, juga sejalan dengan era perdagangan bebas yang akan dihadapi mulai tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Potensi dan Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian

Indonesia sebagai Negara agraris dan maritim, sektor pertanian merupakan salah satu “penggerak utama” perekonomian Indonesia. BPS (2011) antara lain menyebutkan bahwa pada tahun 2010 sektor ini menyumbang 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, menyerap 42 persen angkatan kerja. Sektor pertanian berperan sebagai penyedia pangan dan bahan baku industri serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor ini menjadi salah satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Masyarakat pertanian baik di dalam maupun luar negeri diberi ruang dan kesempatan yang luas berperan serta aktif guna mendorong laju pembangunan nasional.

Sesuai dengan KTT Ketahanan Pangan Dunia yang diselenggarakan pada Bulan November 2009 menghasilkan komitmen untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian dan mengeliminasi masalah kelaparan lebih cepat dari yang ditargetkan semula. Ada dua komitmen yang berkaitan dengan investasi pertanian, yaitu: 1) mencegah kecenderungan menurunnya pendanaan domestik dan asing untuk pertanian, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan di negara berkembang dan meningkatkan bantuan publik secara

signifikan; dan 2) meningkat kan investasi baru untuk produksi dan produktivitas pertanian di negara sedang berkembang untuk mengurangi kemiskinan dan ketahanan pangan untuk masyarakat.

Tingginya angka kemiskinan pada negara-negara berkembang menurut Todaro (2006) disebabkan karena penduduknya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan mempunyai produktivitas yang rendah. Faktor-faktor rendahnya produktivitas sektor pertanian di negara berkembang, yaitu: a) kekurangan peralatan pertanian; b) cara bercocok tanam yang masih tradisional; c) input modernisasi yang rendah; d) penguasaan Ilmu pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah; dan e) kurangnya modal. Dengan demikian, adanya investasi dalam bidang pertanian akan dapat mendorong adanya inovasi-inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor agribisnis sehingga mampu memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pelaku usaha pada khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya.

Pembangunan pada sektor pertanian di Indonesia diarahkan pada upaya peningkatan mutu, produksi dan pemasaran hasil pertanian serta mengembangkan usaha tani terpadu guna memantapkan swasembada pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan komoditi-komoditi ekspor, komoditi bahan-bahan industri dalam negeri, meningkatkan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta mendorong peran serta swasta menanamkan modalnya untuk mengembangkan potensi pertanian.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 kebutuhan investasi di sektor pertanian adalah sebesar Rp 1.360,6 trilyun (PMDN 73 persen dan PMA 27 persen). Target kebutuhan investasi swasta pada tahun 2012 diharapkan dapat mencapai Rp 56,28 trilyun dari investor asing (PMA) dan Rp 144,42 trilyun investor dalam negeri (PMDN). Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka arah dan strategi kebijakan investasi pertanian tahun 2010 - 2014 adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif serta melakukan promosi yang intensif dan tepat sasaran.

Selaras dengan kebijakan otonomi, dalam rangka pengembangan investasi sektor pertanian, maka setiap daerah diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk pengembangan daerah masing-masing. Pelayanan pengembangan investasi pertanian antara lain dilakukan melalui penyediaan data/informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/ agroindustri, berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat luas, terutama calon investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta fasilitasi perencanaan investasi. Dengan demikian diharapkan dapat lebih mendorong calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) pada bidang usaha agribisnis/ agroindustri di Indonesia. Peluang yang sangat besar investasi pada agribisnis/ agroindustri adalah pada subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, industri pangan, dan pengolahan hasil hutan.

Di tengah masih berlangsungnya krisis ekonomi di Eropa dan AS, realisasi investasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sepanjang tahun 2011 realisasi PMA mencapai Rp 175,3 triliun, naik 18,45 persen dibanding realisasi PMA 2010 sebesar Rp 148,0 triliun. Di sisi lain, PMDN mencapai Rp 76 triliun, tumbuh 25,61 persen dibanding realisasi PMDN 2010 sebesar Rp 60,5 triliun. Secara keseluruhan total investasi sebesar Rp 251,3 triliun pada 2011 itu, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 240 triliun. Pencapaian pertumbuhan realisasi investasi 2011 ini menjadi dasar perbaikan rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating dan Moody's yang menempatkan Indonesia pada posisi "*investment grade*" (www.reportaseindonesia.com diunduh tanggal 9 April 2012).

Berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi PMDN paling banyak pada industri tanaman pangan dan perkebunan senilai Rp 9,4 triliun, disusul industri kertas, barang dan kertas dan percetakan (Rp 9,3 triliun), listrik dan air (Rp9,1 triliun), transportasi, gudang dan telekomunikasi (Rp 8,1 triliun), dan industri makanan (Rp 8 triliun). PMA berdasarkan sektor, terbesar

adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi (3,8 miliar dolar AS), pertambangan (3,6 miliar dolar AS), listrik, gas dan air (1,9 miliar dolar), industri logam, barang logam, mesin dan elektronik (1,8 miliar dolar AS), industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (1,5 miliar dolar AS).

Laporan Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2011 menyebutkan bahwa investasi sektor pertanian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2011 sampai dengan Triwulan III masing-masing sebesar Rp 8,2 triliun dan US\$ 1,03 miliar. Besaran investasi PMDN lebih tinggi dibandingkan dengan investasi PMA, dimana pada kedua jenis investasi tersebut lebih banyak di dominasi investasi di bidang pangan dan perkebunan (Kementerian Pertanian, RI, 2012).

Faktor pendorong utama investasi di sektor pertanian menurut Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dalam seminar rutin pada tanggal 20 Juli 2011 yang berjudul "Dampak Investasi Pertanian Terhadap PDB Pertanian, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Petani" adalah prospek pasar komoditas yang makin baik

(harga cukup tinggi) dan tersedianya lahan untuk kelapa sawit, karet dan kakao, baik oleh perusahaan besar maupun petani. Untuk pembiakan sapi potong adalah adanya bimbingan Kelompok Tani dan tersedianya pakan, sedangkan untuk sapi perah adalah harga susu yang cukup baik (pse.litbang.deptan.go.id, diunduh 7 April 2012).

Realisasi penanaman modal di Provinsi Bali melalui fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 meskipun sedikit fluktuatif, namun mengalami kenaikan yang fantastis. Pada tahun 2006 PMDN yang terealisasi sebanyak Rp 40.652 juta, sedangkan pada tahun 2010 yang terelaborasi sebanyak Rp 2.651.362 juta. Realisasi PMA pada tahun 2006 sebanyak \$ 98,955 ribu, dan pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 926,904 ribu (BKPM Provinsi Bali, 2011). Apabila dihitung dalam satuan rupiah, total penanaman modal di Provinsi Bali selama tahun 2006 – 2010 adalah bernilai Rp 13.876.471 juta, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Total Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Bali, Tahun 2006 – 2010

Lapangan Usaha	Nilai Investasi (Rp juta)			Persen
	PMDN	PMA	Jumlah	
Pertanian	34.470	17.555	52.025	0,37
Pertambangan & Penggalian	-	-	-	0,00
Industri pengolahan	73.250	146.904	220.154	1,59
Listrik, Gas, Air Minum	-	58.948	58.948	0,42
Bangunan	1.988	108.450	110.438	0,80
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.146.154	5.904.587	10.050.741	72,43
Pengangkutan dan komunikasi	59.831	197.954	257.785	1,86
Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.	19.910	192.206	212.116	1,53
Jasa-jasa	1.198.737	1.715.527	2.914.264	21,00
Jumlah	5.534.339	8.342.132	13.876.471	100,00

Sumber : Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bali, tahun 2011 (diolah)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2006 – 2010 sebagian besar (59,62 persen) modal yang tertanam di Provinsi Bali berasal dari PMA, sisanya

40,38 persen dari PMDN. Selama tahun 2006 – 2010, rata-rata 96,89 persen teralokasi untuk sektor tersier, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor

Pengangkutan dan komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa. Dari nilai total investasi selama tahun 2006 – 2010 juga diketahui bahwa 72,48 persen investasi teralokasi untuk sektor perdagangan hotel dan restoran, sedangkan pada sektor primer, dalam hal ini sektor pertanian hanya teralokasi sebanyak 0,37 persen.

Fenomena umum yang dialami investasi pada sektor pertanian di Indonesia. Porsi investasi sektor pertanian tahun 2005 sebesar 13,6 persen. Namun, tahun 2009 merosot jadi 6,9 persen. Adapun investasi asing di sektor pertanian, selain proporsinya paling rendah, juga mengalami penurunan dari 3,9 persen (2005) jadi 1,2 persen (2009). Tahun 2009, dari total investasi PMA sebesar 10,81 miliar dollar AS, sektor pertanian hanya sebesar 0,129 miliar dollar AS (www.kompas.com, diunduh pada tanggal 7 April 2012).

Faktor penghambat investasi sektor pertanian antara lain birokrasi yang tidak ramah investor, prosedur berbelit, tidak transparan, dan tenggang waktu pengurusan ijin tak pasti sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, status lahan yang tidak jelas, infrastruktur yang kurang memadai, serta informasi soal potensi, peluang, prospek, dan prosedur investasi kurang. Secara umum, beberapa indikator yang dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan penanaman modal di daerah berdasarkan hasil penelitian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2003) dalam penelitian di berbagai kabupaten/kota adalah faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan infrastruktur fisik.

Potensi investasi di Bali, khusus untuk tanaman pangan dan perkebunan, dengan pemilikan lahan yang sangat sempit (sekitar 30 are) cukup besar. Agar pengelolaan investasi di subsektor pertanian tersebut lebih efisien, dapat dilakukan melalui kelompok tani (Subak), sekaligus memberdayakan lembaga tersebut dari sistem yang tradisional menjadi yang modern dalam rangka untuk lebih mensejahterakan petani. Kelompok tani (Subak) secara musyawarah dapat membuat *business plan* penggunaan investasi tersebut dalam rangka menyediakan sarana produksi

(saprodi), melakukan kegiatan usahatani, mengolah, dan memasarkan hasil.

Peranan Peningkatan Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perokonomian

Investasi di sektor pertanian yang telah dilaksanakan di berbagai daerah berdasarkan hasil beberapa penelitian telah terbukti memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme multiplier seperti yang diuraikan berikut ini.

Investasi, kebijakan ekspor, dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumah tangga. Kebijakan ekspor dan investasi di sektor agroindustri makanan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri non makanan. Penelitian ini dilakukan oleh Priyarsono, dkk. (2005) dengan judul “Peranan Investasi Di Sektor Pertanian Dan Agroindustri Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Distribusi Pendapatan yang dilakukan dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi” menggunakan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 2002.

Darsono (2008) dalam tulisannya yang berjudul “Peran Investasi Dalam Kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia” menyebutkan bahwa peningkatan investasi di sektor pertanian kurang bisa menggerakkan pertumbuhan di sub sektor tanaman pangan, terutama disebabkan belum bisa menciptakan *augmenting* industri pada sub sektor tanaman pangan. Namun, peningkatan investasi di sektor pertanian bisa menggerakkan pertumbuhan industri hortikultura cukup besar, demikian juga peningkatan laju investasi di sektor kehutanan berdampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja dan output yang diproduksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berjudul “Dampak Investasi Pertanian Terhadap PDB Pertanian, Kesempatan Kerja dan Pendapatan Petani” tahun 2011 menyebutkan bahwa investasi pertanian oleh perusahaan besar (PMDN

dan PMA) berdampak positif pada PDB pertanian dan penyerapan tenaga kerja baru. PMDN lebih banyak kontribusinya dalam peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan PMA lebih banyak kontribusinya dalam peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan. Secara agregat nasional, investasi PMDN memberikan kontribusi lebih besar dalam peningkatan PDB sektor pertanian, tetapi PMA memberikan kontribusi lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja baru. Investasi pertanian oleh rumah tangga petani juga berdampak positif pada pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Demikian juga investasi oleh rumah tangga petani dapat meningkatkan populasi sapi potong pada usaha pembiakan, meningkatkan produksi susu segar lokal pada usaha peternakan sapi perah yang berarti mengurangi impor susu segar, meningkatkan luas panen dan produktivitas pertanian (padi, kedelai dan sayuran) pada pompa air di sawah tadah hujan sehingga produksi pertanian dan kesempatan kerja juga meningkat, serta menurunkan biaya sekaligus mempercepat waktu pengolahan lahan pada traktor.

SIMPULAN DAN SARAN

Investasi di sektor pertanian mempunyai potensi yang tinggi untuk ditingkatkan karena prospek pasar komoditas yang makin baik (harga cukup tinggi) dan tersedianya lahan untuk kelapa sawit, karet dan kakao, baik oleh perusahaan besar maupun petani. Subsektor peternakan, perikanan, tanaman bahan makanan serta hortikultura masih memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan fasilitas investasi.

Untuk meningkatkan pendapatan petani, investasi di sektor pertanian, khususnya untuk tanaman pangan dan perkebunan, dengan pemilikan lahan yang sangat sempit (sekitar 30 are per petani), dapat dimanfaatkan melalui kelompok tani (Subak), sekaligus memberdayakannya lembaga tersebut untuk lebih mensejahterakan petani. Melalui kelompok tani (Subak)

akan dapat dimusyawarahkan mengenai rencana penggunaan investasi tersebut, komoditas apa yang diusahakan, ke mana dipasarkan, dan lain sebagainya.

Beberapa hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa Investasi di sektor pertanian telah terbukti berperan perekonomian, yaitu meningkatkan PDB, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor atau industri lainnya melalui *multiplier effect* dan dan efek keterkaitan (*linkages*).

Berdasarkan uraian di atas diharapkan pemerintah terus berupaya menggairahkan penanaman modal atau investasi di sektor pertanian daerah, yaitu dengan memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan mempermudah perijinan, mengurangi birokrasi, menyediakan data/ informasi mengenai potensi dan peluang investasi sektor agribisnis/ agroindustri serta memperbaiki infrastruktur.

REFERENSI

- Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Bali, 2011. Rekapitulasi Perkembangan Rencana & Realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali, Periode 2006 – 2010. *Laporan* (tidak dipublikasikan).
- Darsono, 2008. Peran Investasi Dalam Kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia. *Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian*, Vol 7 No 3, Oktober 2008.
perpustakaan.uns.ac.id
- Kementerian Pertanian. 2011. *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2011*. Jakarta.
- KPPOD, 2003. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta.
- Priyarsono, D.S, A. Daryanto, dan L.S. Kalangi, 2005. “Peranan Investasi Di Sektor Pertanian Dan Agroindustri Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Distribusi Pendapatan: Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi” *Penelitian Terapan* Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

- Sukirno. 2001. *Pengantar Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P. Dan Stephen C. Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Erlangga, Jakarta.
- Van der Eng. P., 2008. "Capital Formation and Capital Stock in Indonesia, 1950 – 2007". *Working Paper* No. 2008/24. The Arndt-Corden Division of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU college of Asia and Pacific. The Australia National University, Canberra, Australia.
- www. Kompas.com, diunduh 7 April 2012
- www. pse.litbang.deptan.go.id, diunduh 7 April 2012
- www.reportaseindonesia.com diunduh tanggal 9 April 2012